



## Laporan Keuangan Wujud Pertanggungjawaban APBN

PONTIANAK - Rabu, 24 Juli 2019 bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat diadakan Sosialisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Penyusunan Laporan Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Edward U.P. Nainggolan, Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Yusuf Widjaya dan Jajarannya beserta 62 peserta yang mewakili seluruh Satker.

Dalam arahannya, Edward Nainggolan berpesan agar seluruh peserta kegiatan sosialisasi untuk selalu berkinerja terbaik guna

memberikan hasil yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Khususnya dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. "Kita tentunya menginginkan bahwa laporan keuangan kita selalu terjaga kualitasnya yaitu selalu mendapat opini dari BPK yang terbaik yaitu WTP," katanya.

Alhamdulillah, LKPP Tahun 2018 kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Untuk LKKL, BPK telah memberikan opini untuk seluruh LKKL Tahun 2018, di mana 82 Kementerian/Lembaga memperoleh opini WTP (95%), yang mendapat opini WDP empat Kementerian/Lembaga, dan satu Kementerian/Lembaga

yang disclaimer.

"Siklus anggaran dimulai dari perencanaan sampai dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Peningkatan kinerja di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan sangat diperlukan. Para pimpinan wilayah harus memastikan bahwa seluruh satker telah melaksanakan akuntansi dan pelaporan dengan baik. Memperhatikan ketepatan penggunaan akun, Nilai Kapitalisasi Aset dan Aset yang Belum Diregister. Jangan ada Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) khususnya pada satker inaktif, saldo tidak normal dan pagu minus. Rekonsiliasi secara tepat waktu," ungkap Edward Nainggolan.\*



**SOSIALISASI:** Para peserta berfoto bersama usai Sosialisasi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester II TA 2019. IST